

RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN

2027

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

“ Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan suatu instansi atau perangkat daerah, disusun berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) untuk mewujudkan target pembangunan dalam satu tahun anggaran. ”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027” telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027.

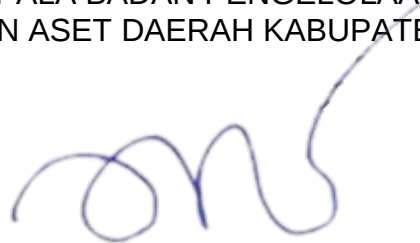
Penyusunan Renja ini merupakan implementasi atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian dokumen renja ini.

Akhir kata semoga Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. IWAN ABDILLAH, S.H., S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197802232002121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bpkad Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bpkad.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.	25
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ..	46
Program Pengelolaan Keuangan Daerah.....	47
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	49
BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD yang disusun kedalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2027;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2021-2027;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2027;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

- (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- p. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada pun tujuannya sebagaimana renstra yang telah ditetapkan adalah ***Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah*** demi terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan serta indikator kinerja OPD dengan **Tujuan** untuk Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan program dan kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam Tabel T-C.29. (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan) berikut:

TABEL T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
									Target Renja PD Tahun (2025)	Realisasi Renja PD Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
5	02				KEUANGAN	% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,45	85,45	85,45	85,45	100%	85,45	85,45	100%
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100%	5	5	100%
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	50	50	50	100%	51	51	100%
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51	50	50	50	100%	51	51	100%
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180	180	180	180	100%	180	180	100%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	48	48	100%	48	48	100%
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	2	2	100%	2	2	100%

5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	4	4	100%	4	4	100%
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	86	86	86	86	100%	86	86	100%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	35	35	35	100%	35	35	100%
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%

5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	20	20	20	100%	20	20	100%
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150	150	150	150	100%	150	150	100%
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150	150	150	150	100%	150	150	100%
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	98	98	98	98	100%	98	98	100%
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	98	98	98	98	100%	98	98	100%
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450	450	450	450	100%	450	450	100%
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450	450	450	450	100%	450	450	100%
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	450	450	450	450	100%	450	450	100%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16	16	16	16	100%	16	16	100%
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	6	6	6	100%	6	6	100%
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8	8	8	8	100%	8	8	100%
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300	300	300	300	100%	300	300	100%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	600	600	600	600	100%	600	600	100%
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	15	15	15	15	100%	15	15	100%

5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	225	225	225	225	100%	225	225	100%
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7	7	7	7	100%	7	7	100%
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1	1	100%	1	1	100%
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3	3	3	3	100%	3	3	100%
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	100%	2	2	100%
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	576	576	576	576	100%	576	576	100%
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	500	500	500	100%	500	500	100%
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	192	192	192	192	100%	192	192	100%
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96	96	96	96	100%	96	96	100%

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas:

Bahwa pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD atas pencapaian Visi Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD atas Opini BPK dapat diraih sesuai harapan yakni WTP.

Demikian juga atas Indikator Kinerja Utama yang ke 2 yakni Persentase SKPD dengan tata kelola keuangan yang baik dapat dicapai secara maksimal yakni seluruh SKPD telah menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan baik.

Kedua hal tersebut diatas sejalan dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang diampuh oleh Para Kepala Bidang di BPKAD Kab. Mojokerto dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja Program pada Bidang Anggaran Persentase PD yang menyusun anggaran berorientasi kinerja dan tepat waktu.

Pada tahun 2025 lalu BPKAD menargetkan 100% atas penyusunan RKA di OPD sesuai pedoman. Pencapaian target ini didasarkan pada Siklus Penyusunan APBD dan PAPBD dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Dari target capaian yang ditetapkan tersebut dapat dikatakan **tercapai** karena Penyusunan APBD 2025 didukung Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan Prioritas Plafon Anggaran sesuai RKPD Pemerintah Daerah.

Pencapaian atas target Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai Indikator Kinerja "Persentase PD yang menyusun anggaran berorientasi kinerja dan

tepat waktu” dapat dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini dapat digambarkan bahwa ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut bahwa Rancangan APBD telah disajikan sesuai Program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dimana RKA yang disusun Perangkat Daerah telah mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. **Target Indikator Kinerja Program ke 2 yaitu Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan sesuai ketentuan**

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkat seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan, 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan: Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. **Target Indikator Kinerja Program ke 3 yaitu Jumlah laporan keuangan yang dikonsolidasi sesuai ketentuan**

Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkat seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta

Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun.

Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi asset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
2. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Target Indikator Kinerja Program yang ke 4 adalah Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Dengan diberlakukannya Permendagri 19 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menargetkan seluruh Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengelolaan BMD tersebut sesuai amanat dalam Permendagri, dari Pendataan Aset, Penilaian Aset, Penghapusan Aset serta Pemindahtangan Aset. Agar Indikator tersebut dapat tercapai Bidang Pengelolaan Aset telah menetapkan Program dan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Standar Harga.
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah.

5. Pengamanan Barang Milik Daerah.
6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
7. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
8. Pembinaan Pengelolaan barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Aset tersebut, seluruh OPD telah dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta rekonsiliasi secara berkesinambungan setiap bulan sehingga Target Indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 tersebut diatas.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berhasil dari tahun ke tahun. Hal ini karena didukung atas keberhasilan atas Penetapan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

KESIMPULAN:

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebesar 91,11% atau sebesar Rp.701.073.370.635,00 dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp.769.512.645.086,46

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran
2. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan
3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi;
2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD;
3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di Bidang penatausahaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada para pengelola keuangan SKPD se Kab. Mojokerto;
2. Melakukan evaluasi Kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Identifikasi fakto-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi;
4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKAD dan SKPD se Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM utamanya di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan;
2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD;
3. Meningkatkan kualitas reviu atas Laporan Kinerja SKPD;
4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD se Kab. Mojokerto

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan Tahun 2025 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan dukungan SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pelaporan keuangan, karena selaku BPKAD menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan selaku SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam Penyusunan RKA/DPA, Belanjanya berbeda dengan SKPD lain, karena terdapat belanja tidak terduga dan belanja transfer yang tidak terdapat di SKPD lain.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto mempunyai SILPA lumayan besar, dikarenakan SKPD tidak merealisasikan secara optimal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Sedangkan dari sisi kualitas, sebagaimana Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP) berturut-turut sebanyak 11 (sebelas) kali, hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana tergambar dalam Tabel T.C-30 berikut:

TABEL T.C-30
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto:

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2027 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;
 8. Terjalannya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;

9. Terjalannya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (Pemerintah Desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Program dan kegiatan Tahun 2027 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2027 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2027.

Dalam rancangan RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dimana dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3,1
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
REVIU TERHADAP RKPD TAHUN 2027

NAMA PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	RKPD PERUBAHAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEUANGAN				531.089.802.563					531.321.996.588
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80	48.843.820.930	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80	48.843.820.930
			Nilai Reformasi Birokrasi	75,00				Nilai Reformasi Birokrasi	75,00	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	
			Indeks Profesionalitas ASN	83				Indeks Profesionalitas ASN	83	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	11.748.991	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	11.748.991
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5.873.991,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5.873.991,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	5.875.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	5.875.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	42.860.545.631	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	42.860.545.631
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	42.860.545.631,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	317.871.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	317.871.200

	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	-	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	-
	Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundangundangan	180 Orang	317.871.200,00	Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundangundangan	180 Orang	317.871.200,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	936.972.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	936.972.800
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	311.863.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	311.863.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	56.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	56.250.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	58.841.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	58.841.500,00
	Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	48 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	48 Dokumen	50.000.000,00
	Penyediaan bahan/material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	99.376.000,00	Penyediaan Bahan / Material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	99.376.000,00
	Fasilitasi Kunjungan tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	150.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	150.000.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	95.642.300,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	95.642.300,00
	Pemantausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip	100 meter linier	100.000.000,00	Pemantausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip	100 meter linier	100.000.000,00

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	150.000.000,00
	Pengadaan Mebel	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	150.000.000,00	Pengadaan Mebel	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	150.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.174.886.608	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.174.886.608
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	4.082.555.728,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	4.082.555.728,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	92.330.880,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	92.330.880,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	541.795.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	541.795.700
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	222.995.700,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	222.995.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	218.800.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	218.800.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	100.000.000,00
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	479.195.338.633	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	479.427.532.658
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.374.377.800	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.374.377.800

	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	134.413.450,00	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	134.413.450,00
	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	128.624.350,00	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	128.624.350,00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	158.045.950,00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	158.045.950,00
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	27.620.000,00	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	27.620.000,00
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	237.889.000,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	237.889.000,00
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	231.284.600,00	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	231.284.600,00
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	371.500.450,00	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	371.500.450,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	474.057.362	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	706.251.387
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	118.190.975,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	350.385.000,00
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	55.942.800,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	55.942.800,00

	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	66.932.187,00	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	66.932.187,00
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	232.991.400,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	232.991.400,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	473.725.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	473.725.100
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	88.684.050,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	88.684.050,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	41.875.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	15 Laporan	41.875.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	225 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	225 Dokumen	150.000.000,00
	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	100.000.000,00	Pertanggungjawaban Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	7 Dokumen	100.000.000,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	93.166.050,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	93.166.050,00

4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	476.873.178.371	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	476.873.178.371
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	402.258.534.086	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	402.258.534.086
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.614.644.285	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.614.644.285
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	69.000.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	69.000.000.000
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.050.643.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.050.643.000
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi				Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.050.643.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.050.643.000
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	935.102.000,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	935.102.000,00
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	92.920.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	92.920.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	246.235.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	246.235.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	348.008.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	348.008.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	802.597.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	802.597.000,00

	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	377.356.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	377.356.000,00
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	118.595.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	576 Laporan	118.595.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	129.830.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	129.830.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan aset/barang daerah adalah Nihil, karena sampai dengan saat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan baik dari Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi serta dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada kami tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pada Tahun 2027, dimana merupakan tahun kedua pelaksanaan program pembangunan Visi Misi Bupati terpilih dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2027 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Perekonomian nasional Tahun 2027 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian Tahun 2027, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal Tahun 2027 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Misi ke 1 Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yaitu “**Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat**”. Telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik . Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Indikator Tujuan adalah Opini BPK.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 3 (tiga) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksanaan pencapaian misi ke 1 RPJMD pada Tahun 2027, terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2027 sebesar Rp46.033.275.299,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2027 sebesar Rp479.195.338.633,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai ketentuan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2027 sebesar Rp3.050.646.000,00

Dalam Menjalankan Program tersebut harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Untuk BPKAD Indikator sasaran RPJMD adalah Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2025, maka BPKAD mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2028
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2027				CATATAN PEN TING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OPINI BPK		WTP	530.379.259.932			WTP	532.379.259.932
		% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik		100%				100%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,20 (A)	48.133.275.299	APBD		85,60 (A)	50.133.275.299
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	11.748.991	APBD		100%	11.748.991
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	SEKRE TARIAT BPKAD	5	5.873.991	APBD		5	5.873.991
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRE TARIAT BPKAD	12	5.875.000	APBD		12	5.875.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	42.000.000.000	APBD		100%	44.100.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	SEKRE TARIAT BPKAD	7.403	42.860.545.631	APBD		7.403	42.860.545.631
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	317.871.200	APBD		100%	317.871.200
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta	SEKRE TARIAT BPKAD	2	-	APBD		2	-

		kelengkapannya							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	SEKRE TARIAT BPKAD	180	317.871.200	APBD		180	317.871.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	936.972.800,00	APBD		100%	836.972.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	2	15.000.000	APBD		2	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	2	311.863.000	APBD		2	311.863.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	12	56.250.000	APBD		12	56.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	2	58.841.500	APBD		2	58.841.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	48	50.000.000	APBD		48	50.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	2	99.376.000	APBD		2	99.376.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	SEKRE TARIAT BPKAD	2	150.000.000	APBD		2	150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	SEKRE TARIAT BPKAD	12	95.642.300	APBD		12	95.642.300
	Pemantauan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip	SEKRE TARIAT BPKAD		100.000.000	APBD			100.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	SEKRE TARIAT BPKAD		150.000.000	APBD			150.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	4.174.886.608	APBD		100%	4.174.886.608

		daerah yang dilaksanakan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SEKRE TARIAT BPKAD	4	4.082.555.728	APBD		4	4.082.555.728
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	SEKRE TARIAT BPKAD	84	92.330.880	APBD		84	92.330.880
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	541.795.700	APBD		100%	541.795.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	SEKRE TARIAT BPKAD	35	222.995.700	APBD		35	222.995.700
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	SEKRE TARIAT BPKAD	1	218.800.000	APBD		1	218.800.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	SEKRE TARIAT BPKAD	20	100.000.000	APBD		20	100.000.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP		100%	479.195.338.633	APBD		100%	479.195.338.633
	2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	Bidang Anggaran	100%	1.374.377.800	APBD		100%	1.374.377.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	150	134.413.450	APBD		150	134.413.450
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Bidang Anggaran	150	128.624.350	APBD		150	128.624.350
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	98	158.045.950	APBD		98	158.045.950
	Koordinasi, Penyusunan	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Bidang Anggaran	98	27.620.000	APBD		98	27.620.000

	dan Verifikasi DPA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	450	237.889.000	APBD		450	237.889.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran	450	231.284.600	APBD		450	231.284.600
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun	Bidang Anggaran	49	85.000.000	APBD		49	85.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bidang Anggaran	15	371.500.450	APBD		15	371.500.450
	2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100%	474.057.362	APBD		100%	474.057.362
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	16	118.190.975	APBD		16	118.190.975
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	6	55.942.800	APBD		6	55.942.800
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	8	66.932.187	APBD		8	66.932.187

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	300	232.991.400	APBD		300	232.991.400
	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100%	473.725.100	APBD		100%	473.725.100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	600	88.684.050	APBD		600	88.684.050
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	15	41.875.000	APBD		15	41.875.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	225	150.000.000	APBD		225	150.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	7	100.000.000	APBD		7	100.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	100	93.166.050	APBD		100	93.166.050

		Kabupaten / Kota							
	2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SEKRE TARIAT BPKAD	100%	476.873.178.371	APBD		100%	476.873.178.371
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SEKRE TARIAT BPKAD	2	402.258.534.086	APBD		2	402.258.534.086
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	SEKRE TARIAT BPKAD	1	5.614.644.285	APBD		1	5.614.644.285
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	SEKRE TARIAT BPKAD	2	69.000.000.000	APBD		2	69.000.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelol aan BMD	100%	3.050.646.000	APBD		100%	3.050.646.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Bidang Pengelol aan BMD	100%	3.050.646.000	APBD		100%	3.050.646.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Bidang Pengelol aan BMD	3	935.105.000	APBD		3	935.105.000
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Bidang Pengelol aan BMD	1	92.920.000	APBD		1	92.920.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelol aan BMD	2	246.235.000	APBD		2	246.235.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Bidang Pengelol aan BMD	5	-	APBD		5	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Bidang Pengelol aan BMD	576	348.008.000	APBD		576	348.008.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelol aan BMD	500	802.597.000	APBD		500	802.597.000
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Bidang Pengelol aan BMD	4	-	APBD		4	-

		Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah							
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelol aan BMD	192	377.356.000	APBD		192	377.356.000
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelol aan BMD	576	118.595.000	APBD		576	118.595.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Pengelol aan BMD	96	129.830.000	APBD		96	129.830.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada rancangan RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu dukungan kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada Tahun 2025 tersebut, maka BPKAD mengusulkan beberapa Program dan kegiatan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp5.873.991,00

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp5.875.000,00

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn diusulkan sebesar Rp42.860.545.631,00

1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan diusulkan sebesar Rp167.820.750,00

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.4.1 *Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp15.000.000,00*
- 1.4.2 *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp311.863.000,00*
- 1.4.3 *Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp56.250.000,00*
- 1.4.4 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp58.841.500,00*
- 1.4.5 *Penyediaan bahan bacaan dan per UU diusulkan sebesar Rp50.000.000,00*
- 1.4.6 *Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp99.376.000,00*
- 1.4.7 *Fasilitasi Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp150.000.000,00*
- 1.4.8 *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp95.642.300,00*
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.5.1 *Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik diusulkan sebesar Rp3.971.554.728,00*
 - 1.5.2 *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp92.330.880,00*
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.6.1 *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan diusulkan sebesar Rp222.995.700,00*
 - 1.6.2 *Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp479.851.450,00*
 - 1.6.3 *Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp100.100.000,00*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah
 - 2.1.1 Koordinasi penyusunan KUA dan PPA diusulkan sebesar Rp133.961.450,00

- 2.1.2 Koordinasi penyusunan KUPA dan perubahan PPAS diusulkan sebesar Rp163.066.500,00
- 2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD diusulkan sebesar Rp158.045.950,00
- 2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD diusulkan sebesar Rp30.377.800,00
- 2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda ABD dan Perkada tentang Penjabaran APBD diusulkan sebesar Rp237.000.000,00
- 2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran PAPBD diusulkan sebesar Rp231.000.000,00
- 2.1.7 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp335.926.100,00
- 2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp143.787.000,00
 - 2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp61.166.000,00
 - 2.2.3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank diusulkan sebesar Rp93.104.200,00
 - 2.2.4 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp283.570.900,00
- 2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah
 - 2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp70.884.050,00
 - 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diusulkan sebesar Rp84.075.000,00
 - 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp185.827.900,00
 - 2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah diusulkan sebesar Rp100.000.000,00

- 2.3.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp93.438.150,00
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp446.698.026.700,00
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp5.614.644.285,00
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp69.000.000.000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga Rp935.105.000,00
 - 3.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp92.920.000,00
 - 3.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD diusulkan sebesar Rp246.235.000,00
 - 3.1.4 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp348.008.000,00
 - 3.1.5 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp802.597.000,00
 - 3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp377.356.000,00
 - 3.1.7 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp118.595.000,00
 - 3.1.8 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp129.830.000,00

BAB V

PENUTUP

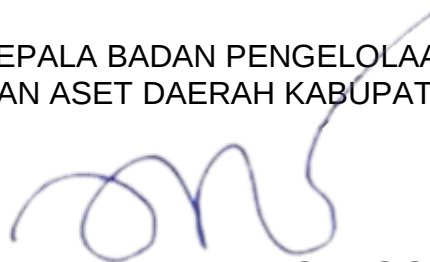
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2027 yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto, Juni 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, S.H., S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004